

**Nama** : Saqila Rahma Andini  
**NPM** : 2313031020  
**Kelas** : A 2023

## **ANALISIS KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN PT ASURANSI JIWASRAYA DENGAN ANALISIS FRAUD PENTAGON**

---

---

Salah satu skandal keuangan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus PT Asuransi Jiwasraya. Kasus ini tidak hanya menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah, tetapi juga mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional dan sistem keuangan Indonesia secara keseluruhan. Menurut saya, kasus Jiwasraya menjadi contoh nyata bagaimana lemahnya integritas, transparansi, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dapat menimbulkan dampak yang sangat besar, baik bagi negara maupun masyarakat. Sebagai perusahaan milik negara (BUMN) yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar, Jiwasraya seharusnya menjalankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Namun, kenyataannya justru terjadi berbagai penyimpangan yang dilakukan secara sistematis dalam jangka waktu yang panjang.

Laporan keuangan merupakan salah satu instrumen penting dalam pengambilan keputusan manajemen perusahaan. Laporan keuangan yang baik harus memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh pengguna informasi keuangan. Akan tetapi, dalam kasus Jiwasraya, menurut saya prinsip-prinsip tersebut tidak diterapkan dengan baik. Manajemen perusahaan justru berusaha menampilkan kondisi keuangan yang tampak sehat, meskipun pada kenyataannya perusahaan sedang mengalami masalah keuangan yang serius. Upaya untuk mempertahankan citra perusahaan dan menjaga kepercayaan investor menjadi alasan utama terjadinya manipulasi laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen lebih mengutamakan kepentingan jangka pendek dibandingkan keberlangsungan perusahaan dan perlindungan terhadap nasabah.

Salah satu produk yang menjadi pusat permasalahan adalah JS Saving Plan. Produk ini menawarkan tingkat imbal hasil yang tinggi dengan risiko yang terlihat rendah. Menurut saya, strategi pemasaran seperti ini sangat berbahaya karena dapat menyesatkan masyarakat. Dalam dunia investasi, prinsip dasar yang umum diketahui adalah semakin tinggi tingkat keuntungan yang ditawarkan, maka semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung. Namun, Jiwasraya seolah-olah memberikan jaminan bahwa nasabah dapat memperoleh keuntungan besar tanpa risiko yang sepadan. Kondisi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *mis-selling* atau penjualan produk yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Banyak masyarakat tertarik untuk membeli produk tersebut karena tergiur dengan janji keuntungan tinggi dan percaya pada reputasi perusahaan BUMN.

Dana yang dihimpun dari nasabah kemudian diinvestasikan ke berbagai instrumen berisiko tinggi, termasuk saham-saham berkualitas rendah yang memiliki fundamental lemah. Menurut saya, keputusan investasi seperti ini menunjukkan buruknya manajemen risiko dalam perusahaan. Alih-alih mengelola dana nasabah secara hati-hati, perusahaan justru menempatkan dana pada investasi spekulatif yang tidak sehat. Ketika nilai investasi tersebut mengalami penurunan, Jiwasraya tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah sehingga terjadi gagal bayar. Situasi ini kemudian berkembang menjadi skandal besar yang merugikan banyak pihak.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan adanya kekurangan pencadangan dan laba semu sejak tahun 2006. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kondisi keuangan Jiwasraya sebenarnya sudah bermasalah sejak lama. Menurut saya, hal ini menjadi bukti bahwa manajemen secara sengaja melakukan manipulasi laporan keuangan untuk menutupi kerugian perusahaan. Manipulasi tersebut dilakukan agar perusahaan tetap terlihat sehat di mata investor, pemerintah, dan masyarakat. Bahkan ketika auditor eksternal memberikan opini yang tidak wajar terhadap laporan keuangan perusahaan, manajemen tetap tidak melakukan perbaikan yang signifikan. Situasi ini menunjukkan adanya kelemahan serius dalam sistem pengendalian internal perusahaan.

Untuk memahami penyebab terjadinya kecurangan dalam kasus Jiwasraya, teori *Fraud Pentagon* dapat digunakan sebagai pendekatan analisis yang relevan. Teori ini menjelaskan bahwa kecurangan biasanya dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kompetensi (*competence*), dan arogansi (*arrogance*). Dalam kasus Jiwasraya, kelima faktor tersebut terlihat dengan sangat jelas dan saling berkaitan satu sama lain.

Faktor pertama adalah tekanan. Menurut saya, tekanan yang dihadapi manajemen Jiwasraya berasal dari tuntutan untuk mempertahankan reputasi perusahaan dan menunjukkan kinerja keuangan yang baik di tengah persaingan industri asuransi yang semakin ketat. Sebagai perusahaan BUMN, Jiwasraya memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan pemerintah. Tekanan tersebut akhirnya mendorong manajemen mengambil jalan yang salah dengan memanipulasi laporan keuangan dan menyembunyikan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Faktor kedua adalah peluang. Lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian internal memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kecurangan. Menurut saya, pengawasan yang kurang efektif dari pihak internal maupun eksternal membuat tindakan manipulasi dapat berlangsung dalam waktu yang lama tanpa terdeteksi secara maksimal. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengelolaan investasi juga memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Faktor ketiga adalah rasionalisasi. Pelaku kecurangan biasanya mencari pembenaran atas tindakan yang mereka lakukan. Dalam kasus Jiwasraya, saya menduga manajemen merasa bahwa manipulasi laporan keuangan dilakukan demi “menyelamatkan” perusahaan dan mempertahankan kepercayaan investor. Mereka mungkin berpikir bahwa kondisi perusahaan dapat membaik di masa depan sehingga tindakan tersebut dianggap sebagai solusi sementara. Namun, menurut saya alasan seperti itu tidak dapat diterima karena tetap melanggar hukum, etika, dan prinsip profesionalisme.

Faktor keempat adalah kompetensi. Kecurangan dalam kasus Jiwasraya dilakukan secara sistematis dan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kemampuan di bidang keuangan dan investasi. Menurut saya, pelaku memiliki pengetahuan yang cukup untuk memanfaatkan kelemahan sistem, menyusun skema investasi yang rumit, dan memanipulasi laporan keuangan agar terlihat meyakinkan. Kemampuan tersebut justru digunakan untuk melakukan tindakan yang merugikan perusahaan dan masyarakat.

Faktor terakhir adalah arogansi. Dalam kasus ini, pelaku tampaknya merasa memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar sehingga menganggap diri mereka kebal terhadap hukum. Menurut saya, sikap arogan inilah yang membuat mereka berani melakukan kecurangan dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu yang lama. Mereka seolah yakin bahwa tindakan mereka tidak akan terungkap atau mendapatkan sanksi hukum yang tegas.

Dampak dari skandal Jiwasraya sangat luas dan tidak hanya dirasakan oleh nasabah perusahaan. Kasus ini juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi dan lembaga keuangan lainnya. Banyak masyarakat menjadi ragu untuk berinvestasi atau menggunakan produk asuransi karena takut mengalami kerugian serupa. Menurut saya, kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan sektor keuangan nasional dan mengganggu stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. BPK mencatat kerugian negara mencapai sekitar Rp16,8 triliun, namun dampak ekonominya diperkirakan jauh lebih besar jika memperhitungkan hilangnya kepercayaan publik dan dampak sosial yang ditimbulkan.

Menurut saya, seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini harus bertanggung jawab secara hukum maupun moral. Hukuman pidana memang penting untuk memberikan efek jera, tetapi itu saja tidak cukup. Pemerintah juga harus melakukan pemulihan aset agar kerugian negara dapat diminimalkan. Selain itu, sistem pengawasan dan tata kelola perusahaan perlu diperbaiki secara menyeluruh agar kasus serupa tidak terulang kembali di masa depan.

Kasus Jiwasraya juga menunjukkan bahwa peran auditor internal maupun auditor eksternal belum berjalan secara optimal. Auditor seharusnya mampu mendeteksi adanya indikasi manipulasi laporan keuangan sejak awal. Namun, dalam

praktiknya, pengawasan yang dilakukan masih memiliki banyak kelemahan. Oleh karena itu, menurut saya sistem audit di Indonesia perlu direformasi dengan memperkuat independensi auditor, meningkatkan kualitas pengawasan, dan memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran profesional. Selain itu, lembaga seperti BPK dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga harus memperkuat pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar.

Kasus Jiwasraya seharusnya menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan BUMN. Transparansi, akuntabilitas, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik harus menjadi prioritas utama. Menurut saya, perusahaan BUMN tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan jangka pendek, tetapi juga harus mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Selain reformasi di tingkat perusahaan dan pemerintah, masyarakat juga perlu diberikan edukasi mengenai literasi keuangan. Banyak masyarakat yang belum memahami risiko investasi sehingga mudah tergiur dengan penawaran keuntungan tinggi. Edukasi mengenai produk keuangan, risiko investasi, dan pentingnya membaca informasi secara teliti perlu terus ditingkatkan. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam memilih produk investasi dan tidak mudah menjadi korban penipuan atau investasi bermasalah seperti JS Saving Plan.

Saya juga mendukung pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset agar proses pengembalian kerugian negara akibat tindak korupsi dan kecurangan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif. Selain itu, kerja sama internasional juga sangat penting karena aset hasil kejahatan sering kali disembunyikan di luar negeri. Menurut saya, Indonesia perlu memperkuat kerja sama dengan berbagai negara dan lembaga internasional agar proses pelacakan, pembekuan, dan penyitaan aset dapat berjalan lebih efektif.

Pada akhirnya, kasus Jiwasraya memberikan pelajaran yang sangat penting bagi semua pihak mengenai bahaya kecurangan dalam pengelolaan keuangan. Transparansi dalam pelaporan keuangan, pengawasan yang ketat, integritas manajemen, dan edukasi masyarakat merupakan faktor utama untuk mencegah

terjadinya kasus serupa di masa depan. Saya percaya bahwa dengan sistem pengawasan yang lebih baik dan komitmen yang kuat terhadap prinsip kejujuran serta akuntabilitas, kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan Indonesia dapat dipulihkan kembali.

Referensi :

Haryanti, R. (2023). Analisis Kecurangan Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya dengan Analisis Fraud Pentagon. *Sanskara Akuntansi dan Keuangan*, 1(02), 92-99.

Hukumonline. (2024, 19 Juni). Memahami Dampak Putusan Perkara Korupsi PT. Asuransi Jiwasraya melalui Eksaminasi Publik: Perspektif Hukum dan Sosial. Seminar Publik, Ibis Styles Jakarta Tanah Abang. Tim Hukumonline. Diakses dari :

<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-dampak-putusan-perkara-korupsi-pt-asuransi-jiwasraya-melalui-eksaminasi-publik-1t66724c76ad0f0/>

**PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT, UKURAN KAP,  
DAN PERAN INTERNAL AUDITOR TERHADAP KETEPATAN  
WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN AUDIT**

---

---

Menurut saya, ketepatan waktu penyampaian laporan audit merupakan aspek yang sangat penting dalam dunia bisnis, terutama bagi perusahaan terbuka. Laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memberikan sinyal positif kepada investor dan para pemangku kepentingan. Keterlambatan pelaporan keuangan dapat menimbulkan ketidakpastian serta menurunkan tingkat kepercayaan pasar terhadap perusahaan. Oleh karena itu, saya setuju bahwa manfaat laporan keuangan akan berkurang apabila informasi tidak tersedia secara tepat waktu. Perusahaan yang mampu menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu menunjukkan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik. Meskipun OJK dan BEI telah memberikan sanksi kepada perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangan, pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang belum patuh. Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa sanksi saja belum cukup sehingga diperlukan pengawasan yang lebih baik serta budaya kepatuhan yang kuat di dalam perusahaan.

Saya sangat tertarik dengan pembahasan mengenai peran komite audit dalam mendukung ketepatan waktu pelaporan audit. Menurut saya, komite audit yang efektif dapat membantu perusahaan lebih disiplin dalam proses pelaporan keuangan. Efektivitas tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ukuran komite audit, keahlian anggota, dan frekuensi pertemuan. Saya berpendapat bahwa frekuensi pertemuan komite audit menjadi faktor yang paling penting karena semakin sering komite audit melakukan pertemuan, semakin besar peluang untuk mendeteksi dan menyelesaikan masalah yang dapat menyebabkan keterlambatan pelaporan. Namun, saya juga setuju dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ukuran komite audit dan keahlian keuangan anggota tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan. Menurut saya, hal ini dapat terjadi karena faktor lain, seperti budaya organisasi, kepemimpinan, dan

kualitas komunikasi internal, justru lebih dominan dalam memengaruhi proses pelaporan keuangan.

Mengenai ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), awalnya saya beranggapan bahwa penggunaan KAP besar seperti Big Four pasti akan mempercepat proses audit. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran KAP tidak selalu berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan audit. Saya memahami bahwa reputasi besar tidak selalu menjamin kecepatan karena klien yang ditangani KAP besar biasanya memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Selain itu, saya juga menilai bahwa auditor internal memiliki peran penting dalam memastikan pengendalian internal berjalan dengan baik. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran auditor internal tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan audit. Menurut saya, kondisi ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan wewenang auditor internal atau kurangnya koordinasi antara auditor internal dan auditor eksternal dalam proses audit.

Secara keseluruhan, saya menilai bahwa faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan audit sangat kompleks dan saling berkaitan. Tidak cukup hanya mengandalkan satu faktor, tetapi diperlukan sinergi antara komite audit, auditor internal, auditor eksternal, serta manajemen perusahaan. Dalam praktiknya, faktor manusia seperti kepemimpinan, motivasi, disiplin, dan budaya kerja sering kali menjadi penentu utama keberhasilan pelaporan yang tepat waktu. Saya juga berpandangan bahwa perusahaan manufaktur memiliki tantangan tersendiri karena kompleksitas operasional dan tingginya volume transaksi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan komunikasi antarbagian, serta membangun budaya kepatuhan yang baik. Menurut saya, ketepatan waktu pelaporan audit merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor struktural dan kultural sehingga setiap perusahaan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pelaporannya agar laporan keuangan dapat disampaikan secara efisien, akurat, dan tepat waktu.

Referensi :

Rahmi, M., & Syofyan, E. (2020). Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Ukuran KAP, dan Peran Internal Auditor Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Audit. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 2956-2975.

## **KASUS PT GARUDA INDONESIA DAN KETEPATAN WAKTU PELAPORAN AUDIT**

---

---

Kasus PT Garuda Indonesia menjadi salah satu contoh penting dalam pembahasan ketepatan waktu penyampaian laporan audit dan kualitas pelaporan keuangan di Indonesia. Pada tahun 2018, laporan keuangan Garuda Indonesia menuai kontroversi karena perusahaan mencatat laba bersih meskipun kondisi keuangan perusahaan sebenarnya masih mengalami tekanan. Polemik ini muncul karena adanya pengakuan pendapatan yang dianggap tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kasus tersebut menimbulkan perhatian besar dari investor, regulator, auditor, dan masyarakat karena menyangkut transparansi laporan keuangan perusahaan publik. Menurut saya, kasus ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu pelaporan audit tidak hanya berkaitan dengan kecepatan penyampaian laporan, tetapi juga menyangkut kualitas dan keandalan informasi yang disampaikan kepada publik.

Dalam perusahaan terbuka seperti Garuda Indonesia, laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber informasi utama bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya. Investor menggunakan laporan keuangan untuk menilai kondisi perusahaan, prospek bisnis, dan risiko investasi. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disampaikan secara tepat waktu agar informasi yang diberikan tetap relevan dalam pengambilan keputusan. Menurut saya, keterlambatan atau ketidakakuratan laporan keuangan dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor dan berdampak negatif terhadap citra perusahaan di pasar modal. Kasus Garuda Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan publik harus menjaga keseimbangan antara ketepatan waktu pelaporan dan kualitas informasi yang disampaikan.

Peran komite audit dalam kasus Garuda Indonesia menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk dikaji. Komite audit seharusnya berfungsi sebagai pihak independen yang mengawasi proses penyusunan laporan keuangan serta memastikan bahwa laporan tersebut telah sesuai dengan standar akuntansi dan prinsip transparansi. Namun, munculnya kontroversi terkait laporan keuangan

Garuda Indonesia menunjukkan bahwa fungsi pengawasan komite audit belum berjalan secara optimal. Menurut saya, efektivitas komite audit tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggota atau keberadaannya secara formal, tetapi juga dipengaruhi oleh kompetensi, independensi, pengalaman, dan intensitas pengawasan yang dilakukan.

Frekuensi pertemuan komite audit juga menjadi faktor penting dalam mendukung ketepatan waktu dan kualitas pelaporan audit. Semakin sering komite audit melakukan rapat dan koordinasi dengan manajemen maupun auditor, maka semakin besar peluang untuk mendeteksi masalah lebih awal. Dalam kasus Garuda Indonesia, saya berpendapat bahwa komunikasi yang lebih intensif antara komite audit dan manajemen mungkin dapat membantu mencegah terjadinya polemik terkait pengakuan pendapatan. Pertemuan yang rutin memungkinkan adanya evaluasi berkala terhadap proses pelaporan keuangan sehingga potensi kesalahan atau penyimpangan dapat segera diperbaiki sebelum laporan dipublikasikan.

Selain komite audit, peran Kantor Akuntan Publik (KAP) juga sangat penting dalam menjaga kualitas laporan audit. Banyak pihak beranggapan bahwa penggunaan KAP besar atau auditor yang memiliki reputasi tinggi akan menghasilkan audit yang lebih berkualitas dan tepat waktu. Namun, kasus Garuda Indonesia menunjukkan bahwa reputasi besar tidak selalu menjamin terbebas dari masalah pelaporan keuangan. Menurut saya, auditor eksternal harus benar-benar menjaga independensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Auditor tidak hanya bertugas memeriksa angka-angka dalam laporan keuangan, tetapi juga harus memastikan bahwa informasi yang disajikan mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Peran auditor internal dalam kasus ini juga tidak kalah penting. Auditor internal seharusnya menjadi pihak pertama yang mampu mendeteksi potensi kesalahan atau penyimpangan dalam proses pelaporan keuangan perusahaan. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, apabila auditor internal tidak memiliki wewenang yang memadai atau kurang mendapatkan dukungan dari manajemen, maka fungsi pengawasan menjadi kurang efektif.

Menurut saya, koordinasi antara auditor internal dan auditor eksternal sangat diperlukan agar proses audit berjalan lebih efisien dan laporan keuangan dapat disampaikan tepat waktu tanpa mengurangi kualitas informasi.

Kasus Garuda Indonesia juga memberikan dampak yang cukup besar terhadap tingkat kepercayaan investor dan reputasi perusahaan. Ketika laporan keuangan dipertanyakan kualitas dan transparansinya, investor akan menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Kondisi ini dapat memengaruhi harga saham perusahaan serta citra perusahaan di mata publik. Menurut saya, perusahaan publik harus memahami bahwa kepercayaan investor merupakan aset yang sangat penting. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa seluruh proses pelaporan keuangan dilakukan secara transparan, akurat, dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Secara keseluruhan, saya menilai bahwa kasus Garuda Indonesia memberikan pelajaran penting mengenai hubungan antara ketepatan waktu pelaporan audit, efektivitas komite audit, kualitas auditor eksternal, dan peran auditor internal. Ketepatan waktu pelaporan audit tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban administratif semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memberikan informasi yang berkualitas kepada publik. Menurut saya, perusahaan harus memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan efektivitas komite audit, serta menjaga independensi auditor agar laporan keuangan yang disampaikan tidak hanya tepat waktu, tetapi juga dapat dipercaya dan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan

**Referensi:**

Ika, S. R., & Ghazali, N. A. M. (2012). *Audit committee effectiveness and timeliness of reporting: Indonesian evidence*. *Managerial Auditing Journal*, 27(4), 403–424.

## KASUS JIWASRAYA DAN LEMAHNYA PENGAWASAN INTERNAL

---

---

Kasus PT Asuransi Jiwasraya merupakan salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia yang menunjukkan lemahnya pengawasan internal serta buruknya tata kelola perusahaan. Jiwasraya mengalami gagal bayar polis nasabah dengan kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah. Permasalahan ini terjadi akibat adanya manipulasi investasi dan laporan keuangan yang dilakukan selama bertahun-tahun secara sistematis. Menurut saya, kasus ini menjadi bukti bahwa ketepatan waktu penyampaian laporan audit saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan kualitas pengawasan dan integritas dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan yang disampaikan tepat waktu belum tentu mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya apabila terdapat manipulasi atau penyimpangan dalam proses pelaporannya. Oleh karena itu, transparansi dan kualitas audit menjadi aspek yang sama pentingnya dengan ketepatan waktu pelaporan.

Kasus Jiwasraya bermula dari strategi investasi perusahaan yang tidak sehat. Dana nasabah yang seharusnya dikelola secara aman dan hati-hati justru ditempatkan pada saham-saham berkualitas rendah dan investasi berisiko tinggi. Keputusan investasi tersebut menyebabkan kerugian besar ketika nilai saham mengalami penurunan. Menurut saya, hal ini menunjukkan lemahnya manajemen risiko dan kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan dana perusahaan. Dalam perusahaan asuransi, pengelolaan dana nasabah harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian karena perusahaan memiliki tanggung jawab besar terhadap dana yang dipercayakan oleh masyarakat. Namun, dalam kasus Jiwasraya, pengelolaan investasi justru dilakukan secara agresif tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang yang dapat merugikan perusahaan dan nasabah.

Dalam kasus Jiwasraya, komite audit dinilai belum menjalankan fungsinya secara optimal. Komite audit seharusnya mampu mengawasi kinerja manajemen dan memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan disusun secara transparan, akurat, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa berbagai penyimpangan dapat berlangsung dalam waktu yang lama tanpa terdeteksi secara efektif. Menurut saya, kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas komite

audit tidak hanya bergantung pada keberadaannya secara formal, tetapi juga dipengaruhi oleh independensi, kompetensi anggota, pengalaman, serta intensitas pengawasan yang dilakukan. Komite audit yang aktif dan independen seharusnya dapat memberikan peringatan dini terhadap berbagai risiko yang dapat mengganggu stabilitas keuangan perusahaan.

Frekuensi pertemuan komite audit juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan. Semakin sering komite audit melakukan rapat dan koordinasi dengan manajemen serta auditor, maka semakin besar peluang untuk mendeteksi masalah lebih awal. Menurut saya, apabila komite audit Jiwasraya lebih aktif dalam melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan dan kebijakan investasi perusahaan, kemungkinan besar berbagai penyimpangan dapat diketahui lebih cepat. Selain itu, komunikasi yang baik antara komite audit dan dewan direksi sangat diperlukan agar setiap potensi risiko dapat segera ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) juga menjadi perhatian dalam kasus Jiwasraya. Banyak orang beranggapan bahwa perusahaan besar yang menggunakan jasa KAP ternama akan memiliki kualitas audit yang lebih baik dan lebih terpercaya. Akan tetapi, menurut saya, reputasi KAP tidak selalu menjamin bahwa laporan audit akan bebas dari masalah. Kompleksitas transaksi investasi dan lemahnya pengendalian internal perusahaan dapat menjadi hambatan dalam proses audit. Auditor eksternal harus benar-benar melakukan pemeriksaan secara mendalam dan tidak hanya bergantung pada informasi yang diberikan oleh manajemen perusahaan. Dalam kasus Jiwasraya, saya menilai bahwa auditor perlu memiliki tingkat skeptisisme profesional yang tinggi agar dapat mendeteksi indikasi manipulasi laporan keuangan sejak awal.

Selain auditor eksternal, peran auditor internal dalam kasus Jiwasraya juga menjadi sorotan penting. Auditor internal memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal perusahaan berjalan dengan baik serta mampu mendeteksi potensi risiko dan penyimpangan sejak dini. Namun, dalam kasus ini auditor internal tampaknya belum mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Menurut saya, kondisi ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan

wewenang, kurangnya independensi, atau lemahnya koordinasi antara auditor internal dengan manajemen dan auditor eksternal. Dalam beberapa perusahaan, auditor internal sering kali tidak memiliki posisi yang cukup kuat untuk memberikan kritik atau rekomendasi kepada manajemen, sehingga pengawasan menjadi kurang optimal.

Kasus Jiwasraya juga menunjukkan bahwa budaya organisasi dan etika bisnis memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas pelaporan keuangan. Menurut saya, lemahnya budaya transparansi dan akuntabilitas dalam perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya manipulasi laporan keuangan. Jika manajemen lebih fokus pada pencapaian keuntungan jangka pendek dan menjaga citra perusahaan dibandingkan menyampaikan kondisi keuangan yang sebenarnya, maka risiko terjadinya kecurangan akan semakin besar. Oleh karena itu, perusahaan perlu membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap aturan.

Dampak dari kasus Jiwasraya sangat besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan dan asuransi di Indonesia. Banyak nasabah merasa dirugikan dan kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan asuransi maupun lembaga keuangan lainnya. Menurut saya, hilangnya kepercayaan publik merupakan salah satu dampak paling serius dari skandal keuangan seperti ini. Kepercayaan masyarakat merupakan aset penting bagi perusahaan jasa keuangan karena bisnis asuransi sangat bergantung pada keyakinan nasabah terhadap kemampuan perusahaan dalam mengelola dana mereka. Ketika kepercayaan tersebut hilang, maka reputasi perusahaan dan industri secara keseluruhan akan ikut terdampak.

Selain berdampak pada masyarakat, kasus Jiwasraya juga memberikan tekanan terhadap pemerintah dan regulator untuk memperbaiki sistem pengawasan di sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta lembaga pengawas lainnya mendapat sorotan karena dianggap kurang cepat dalam mendeteksi permasalahan yang terjadi di Jiwasraya. Menurut saya, kasus ini menjadi pelajaran bahwa pengawasan terhadap perusahaan jasa keuangan harus dilakukan secara lebih ketat, transparan, dan berkelanjutan. Regulasi yang baik

harus diimbangi dengan implementasi pengawasan yang efektif agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal.

Kasus Jiwasraya juga menunjukkan bahwa ketepatan waktu pelaporan audit harus disertai dengan kualitas laporan yang baik dan sistem pengendalian internal yang kuat. Laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu tidak akan memberikan manfaat apabila informasi yang disajikan ternyata tidak akurat atau telah dimanipulasi. Oleh karena itu, menurut saya, perusahaan harus memastikan bahwa proses audit dilakukan secara independen dan profesional. Auditor eksternal, auditor internal, komite audit, serta manajemen harus bekerja sama untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan transparan.

Pelajaran penting dari kasus Jiwasraya adalah perlunya penguatan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*), peningkatan kualitas pengawasan internal, serta koordinasi yang lebih baik antara komite audit, auditor internal, dan auditor eksternal. Menurut saya, perusahaan harus menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai prioritas utama agar laporan keuangan dapat dipercaya dan disampaikan tepat waktu sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat budaya kepatuhan, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses pengawasan dan pelaporan keuangan yang lebih efektif. Dengan demikian, kasus serupa di masa depan dapat dicegah dan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan dapat dipulihkan kembali.

#### **Referensi:**

Rahmi, M., & Syofyan, E. (2020). *Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Ukuran KAP, dan Peran Internal Auditor Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Audit*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 2956–2975.

## **KASUS PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD (AISA)**

---

---

Kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) merupakan salah satu kasus yang cukup besar di Indonesia dan berkaitan dengan permasalahan laporan keuangan, pengendalian internal, serta dugaan manipulasi dana perusahaan. Perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman ini mengalami masalah serius setelah ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan dana dan ketidaksesuaian dalam pencatatan akuntansi. Kasus ini menarik perhatian publik, investor, dan regulator karena perusahaan sebelumnya dikenal sebagai salah satu perusahaan besar di sektor manufaktur. Menurut saya, kasus AISA menunjukkan bahwa kualitas tata kelola perusahaan dan sistem pengawasan internal memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan investor dan memastikan laporan keuangan disusun secara transparan.

Permasalahan AISA mulai mencuat ketika ditemukan indikasi penggelembungan dana dan adanya transaksi yang dianggap tidak wajar dalam laporan keuangan perusahaan. Investigasi yang dilakukan menemukan dugaan penyalahgunaan dana perusahaan dalam jumlah besar. Kondisi ini menyebabkan turunnya kepercayaan investor dan berdampak langsung terhadap harga saham perusahaan di pasar modal. Menurut saya, kasus ini membuktikan bahwa laporan keuangan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keputusan investor. Ketika laporan keuangan dianggap tidak akurat atau menyesatkan, investor akan kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan sehingga kondisi keuangan perusahaan dapat semakin memburuk.

Dalam kasus AISA, peran komite audit menjadi salah satu hal yang banyak disoroti. Komite audit seharusnya bertugas mengawasi proses penyusunan laporan keuangan dan memastikan bahwa seluruh transaksi perusahaan dicatat secara benar sesuai dengan standar akuntansi. Akan tetapi, berbagai penyimpangan yang terjadi menunjukkan bahwa fungsi pengawasan komite audit belum berjalan secara maksimal. Menurut saya, efektivitas komite audit tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggota, tetapi juga oleh kualitas pengawasan, independensi, pengalaman, dan kemampuan anggota dalam memahami risiko bisnis perusahaan. Jika komite

audit tidak bekerja secara aktif, maka potensi terjadinya manipulasi laporan keuangan akan semakin besar.

Frekuensi pertemuan komite audit juga menjadi faktor penting dalam mendukung ketepatan waktu dan kualitas pelaporan audit. Semakin sering komite audit melakukan rapat evaluasi dengan manajemen dan auditor, maka semakin besar peluang untuk mendeteksi masalah lebih awal. Menurut saya, dalam kasus AISA, kurangnya pengawasan yang intensif mungkin menjadi salah satu penyebab berbagai penyimpangan dapat berlangsung cukup lama tanpa terdeteksi secara cepat. Komunikasi yang baik antara komite audit, direksi, dan auditor sangat diperlukan agar setiap potensi masalah dapat segera ditangani sebelum berdampak lebih besar terhadap perusahaan.

Selain komite audit, ukuran dan kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) juga menjadi perhatian dalam kasus ini. Banyak pihak beranggapan bahwa perusahaan besar yang menggunakan jasa KAP ternama akan memiliki kualitas audit yang lebih baik. Namun, menurut saya, reputasi besar tidak selalu menjamin bahwa proses audit akan bebas dari kesalahan atau manipulasi. Auditor eksternal tetap harus menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan memiliki skeptisisme tinggi terhadap seluruh transaksi perusahaan. Dalam kasus AISA, auditor eksternal seharusnya dapat mendeteksi adanya transaksi yang tidak wajar dan memberikan peringatan lebih awal kepada pihak manajemen maupun regulator.

Peran auditor internal dalam kasus AISA juga sangat penting untuk dibahas. Auditor internal memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa sistem pengendalian internal perusahaan berjalan dengan baik dan mampu mencegah terjadinya penyimpangan. Akan tetapi, dalam kasus ini auditor internal tampaknya belum mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Menurut saya, kondisi ini dapat terjadi karena keterbatasan wewenang, kurangnya independensi, atau lemahnya koordinasi antara auditor internal dengan manajemen perusahaan. Jika auditor internal tidak diberikan kebebasan untuk melaporkan temuan secara objektif, maka fungsi pengawasan akan menjadi tidak efektif.

Kasus AISA memberikan dampak yang cukup besar terhadap citra perusahaan dan kepercayaan investor di pasar modal. Banyak investor mengalami kerugian akibat

turunnya harga saham perusahaan setelah kasus ini terungkap. Selain itu, kasus ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas tata kelola perusahaan di Indonesia, khususnya pada perusahaan publik yang mengelola dana investor dalam jumlah besar. Menurut saya, perusahaan publik harus memahami bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor utama dalam menjaga kepercayaan investor. Ketika perusahaan gagal menjaga integritas laporan keuangan, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh investor dan pasar modal secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, saya menilai bahwa kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) memberikan pelajaran penting mengenai hubungan antara komite audit, ukuran KAP, auditor internal, dan ketepatan waktu pelaporan audit. Ketepatan waktu pelaporan audit harus disertai dengan kualitas laporan keuangan yang baik dan sistem pengawasan internal yang efektif. Menurut saya, perusahaan perlu memperkuat tata kelola perusahaan (*good corporate governance*), meningkatkan independensi auditor, serta membangun budaya transparansi dalam organisasi. Selain itu, koordinasi yang baik antara komite audit, auditor internal, dan auditor eksternal sangat diperlukan agar laporan keuangan dapat disampaikan secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan.

**Referensi:**

Ernst & Young Indonesia. (2019). *Investigative Report on PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.*

## **KASUS PT ASABRI**

---

---

Kasus PT Asabri menjadi salah satu skandal keuangan besar di Indonesia yang menyoroti lemahnya tata kelola perusahaan, pengawasan internal, dan pengelolaan investasi. PT Asabri merupakan perusahaan milik negara yang bertugas mengelola dana tabungan dan asuransi bagi prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan. Kasus ini menjadi perhatian besar masyarakat karena kerugian negara yang ditimbulkan mencapai triliunan rupiah. Menurut saya, kasus Asabri menunjukkan bahwa perusahaan yang mengelola dana publik harus memiliki sistem pengawasan yang sangat ketat karena menyangkut kepercayaan dan kesejahteraan banyak pihak. Ketika pengelolaan dana dilakukan secara tidak transparan dan penuh penyimpangan, dampaknya tidak hanya merugikan negara tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan milik pemerintah.

Kasus Asabri memiliki kemiripan dengan kasus Jiwasraya karena sama-sama melibatkan pengelolaan investasi yang bermasalah dan dugaan manipulasi laporan keuangan. Dana perusahaan diduga diinvestasikan pada saham-saham berisiko tinggi dan berkualitas rendah sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar. Menurut saya, strategi investasi seperti ini menunjukkan lemahnya manajemen risiko dan kurangnya kehati-hatian dalam pengelolaan dana nasabah. Perusahaan asuransi seharusnya menempatkan dana investasi pada instrumen yang aman dan stabil agar dapat menjamin kewajiban pembayaran kepada peserta di masa depan. Namun, dalam kasus Asabri, investasi justru dilakukan secara agresif dan tidak memperhatikan prinsip keamanan dana.

Peran komite audit dalam kasus Asabri menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan. Komite audit memiliki tanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Akan tetapi, berbagai penyimpangan yang terjadi dalam kasus Asabri menunjukkan bahwa fungsi pengawasan komite audit belum berjalan secara efektif. Menurut saya, komite audit seharusnya mampu mendeteksi adanya transaksi investasi yang

tidak wajar dan memberikan peringatan kepada manajemen sebelum kerugian perusahaan menjadi semakin besar. Efektivitas komite audit sangat dipengaruhi oleh independensi, kompetensi anggota, dan intensitas pengawasan yang dilakukan secara berkala.

Frekuensi pertemuan dan koordinasi antara komite audit dengan manajemen perusahaan juga sangat penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Semakin aktif komite audit melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan dan aktivitas investasi perusahaan, maka semakin besar peluang untuk mendeteksi masalah lebih awal. Menurut saya, dalam kasus Asabri, lemahnya koordinasi dan kurangnya pengawasan yang intensif memungkinkan berbagai penyimpangan berlangsung dalam waktu yang cukup lama tanpa terdeteksi secara efektif. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa komite audit tidak hanya dibentuk sebagai formalitas, tetapi benar-benar menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan independen.

Selain komite audit, ukuran dan kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) juga menjadi perhatian dalam kasus Asabri. Banyak pihak beranggapan bahwa penggunaan jasa KAP besar akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Namun, menurut saya, reputasi KAP tidak selalu menjamin bahwa seluruh penyimpangan dapat terdeteksi dengan mudah. Auditor eksternal harus tetap menjaga independensi dan skeptisisme profesional dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan. Dalam kasus Asabri, auditor seharusnya mampu melakukan analisis mendalam terhadap transaksi investasi yang berisiko tinggi dan menilai apakah investasi tersebut sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana perusahaan.

Peran auditor internal dalam kasus Asabri juga sangat penting karena auditor internal merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan dengan baik. Auditor internal seharusnya mampu mendeteksi risiko dan penyimpangan sejak awal sebelum masalah berkembang menjadi lebih besar. Akan tetapi, dalam kasus ini auditor internal tampaknya belum mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Menurut saya, kondisi ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan wewenang,

kurangnya independensi, atau lemahnya koordinasi dengan manajemen dan auditor eksternal. Jika auditor internal tidak memiliki posisi yang kuat dalam perusahaan, maka rekomendasi dan temuan audit sering kali tidak ditindaklanjuti dengan baik oleh manajemen.

Kasus Asabri memberikan dampak yang sangat besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi dan lembaga keuangan milik negara. Banyak pihak merasa khawatir terhadap keamanan dana yang dikelola oleh perusahaan asuransi pemerintah. Menurut saya, hilangnya kepercayaan publik merupakan salah satu dampak paling serius dari kasus seperti ini. Dalam industri keuangan, kepercayaan masyarakat merupakan aset utama yang harus dijaga. Ketika perusahaan gagal menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana, maka citra perusahaan dan industri secara keseluruhan akan ikut terdampak negatif. Selain itu, kasus ini juga memberikan tekanan kepada pemerintah dan regulator untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap perusahaan BUMN dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Secara keseluruhan, saya menilai bahwa kasus PT Asabri memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), penguatan sistem pengendalian internal, serta koordinasi yang efektif antara komite audit, auditor internal, dan auditor eksternal. Ketepatan waktu penyampaian laporan audit harus disertai dengan kualitas laporan yang akurat, transparan, dan dapat dipercaya. Menurut saya, perusahaan perlu meningkatkan budaya kepatuhan, memperkuat manajemen risiko, serta memastikan bahwa seluruh proses audit dilakukan secara profesional dan independen. Dengan adanya pengawasan yang kuat dan sistem pelaporan yang transparan, perusahaan dapat mencegah terjadinya penyimpangan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan perusahaan milik negara.

Referensi:

BPK RI. (2021). *Laporan Investigatif Kasus PT Asabri*.

## **KASUS KETERLAMBATAN LAPORAN KEUANGAN EMITEN BEI**

---

---

Setiap tahun Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan daftar perusahaan atau emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan. Keterlambatan tersebut sering disebut sebagai *audit delay*, yaitu lamanya waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menyelesaikan proses audit hingga laporan keuangan dipublikasikan kepada masyarakat. Perusahaan yang terlambat biasanya akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, hingga suspensi perdagangan saham apabila keterlambatan berlangsung terlalu lama. Menurut saya, kasus keterlambatan laporan keuangan ini menjadi perhatian penting karena laporan keuangan merupakan sumber informasi utama bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Jika laporan keuangan terlambat disampaikan, maka informasi yang diterima investor menjadi kurang relevan dan dapat menimbulkan ketidakpastian di pasar modal.

Keterlambatan penyampaian laporan audit dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kompleksitas operasional perusahaan. Perusahaan besar dengan banyak cabang, anak perusahaan, dan transaksi yang kompleks biasanya membutuhkan waktu audit yang lebih panjang dibandingkan perusahaan kecil. Dalam perusahaan manufaktur misalnya, auditor harus memeriksa persediaan, aset tetap, transaksi produksi, hingga pencatatan penjualan dalam jumlah besar. Menurut saya, semakin kompleks aktivitas perusahaan, maka semakin sulit proses audit dilakukan karena auditor membutuhkan waktu lebih lama untuk memastikan bahwa seluruh laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi dan bebas dari kesalahan material.

Selain kompleksitas operasional, lemahnya koordinasi internal perusahaan juga menjadi penyebab utama keterlambatan laporan audit. Dalam banyak kasus, proses penyusunan laporan keuangan tidak berjalan lancar karena kurangnya komunikasi antar departemen, keterlambatan pengumpulan data, atau sistem informasi akuntansi yang belum terintegrasi dengan baik. Menurut saya, perusahaan harus memiliki koordinasi yang efektif antara bagian keuangan, auditor internal, manajemen, dan auditor eksternal agar proses audit dapat berjalan lebih cepat dan

efisien. Jika komunikasi internal tidak berjalan baik, maka auditor akan kesulitan memperoleh data yang dibutuhkan sehingga proses audit menjadi lebih lama.

Peran komite audit juga sangat penting dalam mendukung ketepatan waktu penyampaian laporan audit. Komite audit bertugas mengawasi proses pelaporan keuangan dan memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi yang berlaku. Komite audit yang aktif biasanya akan lebih sering melakukan evaluasi terhadap progres audit dan membantu menyelesaikan hambatan yang muncul selama proses pelaporan keuangan. Namun, menurut saya, keberadaan komite audit saja tidak cukup apabila tidak didukung oleh anggota yang kompeten, independen, dan aktif dalam menjalankan pengawasan. Banyak perusahaan memiliki komite audit hanya sebagai formalitas sehingga fungsi pengawasan belum berjalan secara optimal.

Ukuran dan reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) juga sering dianggap memengaruhi ketepatan waktu pelaporan audit. Banyak perusahaan memilih menggunakan jasa KAP besar atau Big Four dengan harapan proses audit dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih berkualitas. Akan tetapi, menurut saya, ukuran KAP tidak selalu menjamin ketepatan waktu penyampaian laporan audit. KAP besar biasanya menangani perusahaan dengan tingkat kompleksitas tinggi sehingga proses audit juga membutuhkan waktu lebih lama. Selain itu, kualitas komunikasi antara auditor eksternal dan pihak perusahaan juga sangat menentukan kelancaran proses audit. Jika perusahaan tidak kooperatif atau data yang dibutuhkan tidak tersedia dengan cepat, maka auditor akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu.

Peran auditor internal juga sangat berpengaruh dalam mencegah terjadinya audit delay. Auditor internal memiliki tugas untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan dengan baik dan seluruh dokumen keuangan telah disiapkan sebelum proses audit eksternal dimulai. Menurut saya, auditor internal yang kompeten dapat membantu mempercepat proses audit karena mereka dapat memastikan bahwa data dan laporan yang dibutuhkan auditor eksternal sudah lengkap dan sesuai prosedur. Namun, apabila auditor internal tidak bekerja secara efektif atau kurang memiliki koordinasi dengan auditor eksternal, maka proses audit dapat mengalami hambatan dan menyebabkan keterlambatan pelaporan keuangan.

Selain faktor teknis, budaya organisasi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penting dalam ketepatan waktu pelaporan audit. Perusahaan yang memiliki budaya kerja disiplin, transparan, dan berorientasi pada kepatuhan biasanya lebih mampu menyampaikan laporan keuangan tepat waktu. Sebaliknya, perusahaan dengan budaya kerja yang kurang tertib dan manajemen yang lemah cenderung mengalami keterlambatan dalam proses pelaporan. Menurut saya, faktor manusia seperti kepemimpinan, motivasi kerja, disiplin, dan tanggung jawab memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan proses pelaporan keuangan. Teknologi dan sistem yang baik tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung oleh SDM yang kompeten dan berintegritas.

Secara keseluruhan, saya menilai bahwa kasus keterlambatan laporan keuangan emiten di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa ketepatan waktu penyampaian laporan audit dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Tidak hanya ukuran KAP atau keberadaan komite audit, tetapi juga faktor budaya organisasi, kualitas SDM, efektivitas komunikasi internal, serta kekuatan sistem pengendalian internal. Menurut saya, perusahaan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pelaporan keuangan agar laporan audit dapat disampaikan secara tepat waktu, akurat, dan transparan. Dengan pelaporan yang tepat waktu, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan investor, menjaga reputasi perusahaan, dan menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih baik di pasar modal Indonesia.

**Referensi:**

BEI. (2023). *Pengumuman Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Emiten*.

## KASUS ENRON CORPORATION (AMERIKA SERIKAT)

---

---

Kasus Enron Corporation merupakan salah satu skandal akuntansi terbesar dalam sejarah dunia bisnis dan menjadi contoh penting mengenai kegagalan tata kelola perusahaan, lemahnya pengawasan internal, serta buruknya kualitas audit. Enron adalah perusahaan energi asal Amerika Serikat yang pada masanya dikenal sebagai salah satu perusahaan terbesar dan paling inovatif di dunia. Perusahaan ini mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dan berhasil menarik banyak investor karena laporan keuangannya menunjukkan keuntungan yang tinggi. Namun, pada tahun 2001 terungkap bahwa Enron melakukan manipulasi laporan keuangan secara besar-besaran untuk menyembunyikan utang dan memperbesar laba perusahaan. Menurut saya, kasus ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang terlihat baik belum tentu mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya apabila terdapat manipulasi dan kurangnya transparansi dalam proses pelaporannya.

Enron melakukan berbagai praktik akuntansi yang tidak wajar untuk menutupi kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Salah satu metode yang digunakan adalah membentuk perusahaan khusus (*special purpose entities*) untuk menyembunyikan utang dan kerugian perusahaan agar tidak tercatat dalam laporan keuangan utama. Dengan cara tersebut, laporan keuangan Enron terlihat sehat dan menguntungkan meskipun perusahaan sebenarnya memiliki beban utang yang sangat besar. Menurut saya, tindakan ini merupakan bentuk manipulasi yang sangat merugikan investor karena informasi yang disampaikan kepada publik tidak sesuai dengan kondisi nyata perusahaan. Investor akhirnya mengambil keputusan berdasarkan laporan keuangan yang menyesatkan.

Kasus Enron juga menunjukkan pentingnya peran komite audit dalam mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan. Komite audit seharusnya bertanggung jawab memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara transparan dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Namun, dalam kasus Enron, komite audit dinilai gagal mendeteksi atau mencegah praktik manipulasi yang dilakukan manajemen perusahaan. Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit saja tidak cukup apabila tidak didukung oleh independensi,

kompetensi, dan integritas yang kuat. Komite audit harus memiliki keberanian untuk mengawasi manajemen secara objektif dan tidak boleh terpengaruh oleh tekanan dari pihak internal perusahaan.

Selain komite audit, peran Kantor Akuntan Publik (KAP) juga menjadi sorotan besar dalam kasus Enron. Enron menggunakan jasa KAP Arthur Andersen, yang pada saat itu termasuk salah satu KAP terbesar dan paling terkenal di dunia. Namun, Arthur Andersen dianggap gagal menjalankan tugas audit secara independen karena terlalu dekat dengan manajemen Enron. Auditor bahkan diduga ikut membantu menyembunyikan berbagai penyimpangan dalam laporan keuangan perusahaan. Menurut saya, kasus ini membuktikan bahwa reputasi besar sebuah KAP tidak selalu menjamin kualitas audit yang baik apabila independensi auditor terganggu. Auditor eksternal harus mampu menjaga profesionalisme dan tidak boleh memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan klien karena hal tersebut dapat memengaruhi objektivitas audit.

Peran auditor internal dalam kasus Enron juga menjadi perhatian penting. Auditor internal seharusnya memiliki fungsi untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal perusahaan berjalan dengan baik dan mampu mendeteksi potensi kecurangan sejak dini. Akan tetapi, dalam kasus ini, sistem pengendalian internal Enron sangat lemah sehingga manipulasi laporan keuangan dapat berlangsung dalam waktu lama tanpa terdeteksi. Menurut saya, lemahnya pengawasan internal membuat manajemen memiliki peluang besar untuk melakukan penyimpangan. Auditor internal harus memiliki independensi dan akses yang cukup untuk melaporkan berbagai temuan kepada dewan direksi atau komite audit tanpa adanya tekanan dari manajemen perusahaan.

Kasus Enron memberikan dampak yang sangat besar terhadap dunia bisnis dan profesi akuntansi di seluruh dunia. Kebangkrutan Enron menyebabkan ribuan karyawan kehilangan pekerjaan dan investor mengalami kerugian dalam jumlah besar. Selain itu, kasus ini juga menyebabkan runtuhnya Arthur Andersen sebagai salah satu KAP terbesar dunia karena kehilangan kepercayaan publik. Menurut saya, kasus ini menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan aset yang sangat penting dalam dunia bisnis dan audit. Ketika perusahaan maupun auditor

kehilangan integritas dan transparansi, maka kepercayaan investor akan hilang dan dampaknya dapat menghancurkan reputasi perusahaan maupun profesi audit secara keseluruhan.

Sebagai dampak dari kasus Enron, pemerintah Amerika Serikat kemudian mengeluarkan Sarbanes-Oxley Act (SOX) pada tahun 2002 untuk memperkuat pengawasan terhadap perusahaan publik dan profesi audit. Regulasi ini dibuat untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan, memperkuat tanggung jawab manajemen, serta meningkatkan independensi auditor eksternal. Menurut saya, lahirnya regulasi tersebut menunjukkan bahwa kasus Enron menjadi pelajaran besar bagi dunia bisnis internasional tentang pentingnya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan pengawasan yang efektif dalam proses pelaporan keuangan.

Secara keseluruhan, saya menilai bahwa kasus Enron memberikan pelajaran penting mengenai hubungan antara komite audit, ukuran dan reputasi KAP, auditor internal, serta transparansi laporan keuangan. Ketepatan waktu pelaporan audit tidak akan memiliki arti apabila laporan yang disampaikan ternyata mengandung manipulasi dan tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Menurut saya, perusahaan harus membangun budaya transparansi, memperkuat pengendalian internal, dan memastikan independensi auditor agar laporan keuangan dapat dipercaya oleh investor dan masyarakat. Kasus Enron menjadi bukti bahwa lemahnya pengawasan dan hilangnya integritas dalam proses audit dapat menyebabkan kerugian besar serta menghancurkan perusahaan yang sebelumnya dianggap sukses dan terpercaya.

**Referensi:**

Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2003). *The Fall of Enron*. *Journal of Economic Perspectives*, 17(2), 3–26.

## **KASUS TOSHIBA CORPORATION (JEPANG)**

---

---

Kasus Toshiba Corporation merupakan salah satu skandal akuntansi terbesar di Jepang yang mengejutkan dunia bisnis internasional. Toshiba dikenal sebagai perusahaan teknologi besar yang memiliki reputasi tinggi di bidang elektronik, energi, dan infrastruktur. Namun, pada tahun 2015 terungkap bahwa perusahaan telah melakukan manipulasi laporan keuangan selama bertahun-tahun dengan cara melebihkan laba perusahaan. Manipulasi tersebut dilakukan untuk menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik di tengah tekanan persaingan bisnis yang semakin ketat. Menurut saya, kasus Toshiba menunjukkan bahwa tekanan untuk mencapai target keuntungan dapat mendorong manajemen melakukan tindakan yang melanggar etika dan standar akuntansi.

Permasalahan dalam kasus Toshiba bermula dari budaya perusahaan yang memberikan tekanan besar kepada manajemen dan karyawan untuk selalu mencapai target laba. Akibat tekanan tersebut, beberapa divisi perusahaan melakukan pencatatan laba yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Praktik ini berlangsung cukup lama sebelum akhirnya terungkap melalui investigasi independen. Menurut saya, budaya organisasi yang terlalu berorientasi pada target tanpa memperhatikan transparansi dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat dan meningkatkan risiko terjadinya manipulasi laporan keuangan.

Peran komite audit dalam kasus Toshiba menjadi perhatian penting karena pengawasan internal perusahaan dinilai kurang efektif. Komite audit seharusnya dapat mendeteksi adanya penyimpangan dalam laporan keuangan serta memastikan bahwa manajemen menjalankan aktivitas perusahaan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Namun, lemahnya pengawasan menyebabkan praktik manipulasi berlangsung selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Menurut saya, efektivitas komite audit sangat dipengaruhi oleh independensi anggota, keberanian dalam mengawasi manajemen, dan kualitas komunikasi internal perusahaan.

Selain komite audit, auditor eksternal juga mendapat sorotan dalam kasus Toshiba. Auditor dianggap kurang mampu mendeteksi manipulasi laporan keuangan secara cepat meskipun penyimpangan terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Menurut saya, auditor eksternal harus memiliki skeptisisme profesional yang tinggi dan tidak hanya mengandalkan informasi dari manajemen perusahaan. Auditor harus melakukan pemeriksaan mendalam terhadap transaksi dan kebijakan akuntansi perusahaan agar potensi manipulasi dapat diketahui lebih awal. Kasus Toshiba membuktikan bahwa reputasi perusahaan besar tidak menjamin laporan keuangannya bebas dari penyimpangan.

Peran auditor internal dalam kasus ini juga sangat penting karena auditor internal bertugas memastikan sistem pengendalian internal perusahaan berjalan dengan baik. Akan tetapi, lemahnya sistem pengawasan internal membuat berbagai penyimpangan tidak segera diketahui. Menurut saya, auditor internal harus memiliki independensi dan kewenangan yang cukup agar dapat menyampaikan temuan audit secara objektif tanpa tekanan dari manajemen. Jika auditor internal tidak diberi ruang untuk bekerja secara profesional, maka fungsi pengawasan perusahaan akan menjadi tidak efektif.

Kasus Toshiba memberikan dampak besar terhadap reputasi perusahaan dan kepercayaan investor. Harga saham perusahaan mengalami penurunan drastis, dan banyak investor kehilangan kepercayaan terhadap manajemen perusahaan. Selain itu, kasus ini juga menimbulkan keraguan terhadap sistem tata kelola perusahaan di Jepang yang selama ini dikenal kuat. Menurut saya, kepercayaan investor merupakan aset penting yang sangat sulit dipulihkan ketika perusahaan terlibat dalam skandal keuangan. Oleh karena itu, perusahaan harus menjaga integritas laporan keuangan dan memastikan seluruh proses audit berjalan secara transparan.

Sebagai dampak dari kasus Toshiba, perusahaan melakukan berbagai reformasi dalam sistem tata kelola dan pengawasan internal. Toshiba memperbaiki struktur manajemen, memperkuat komite audit, dan

meningkatkan kualitas pengendalian internal perusahaan. Menurut saya, langkah tersebut menunjukkan bahwa perusahaan harus terus melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini. Tata kelola perusahaan yang baik sangat penting untuk menjaga stabilitas perusahaan dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, saya menilai bahwa kasus Toshiba memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya pengawasan internal, independensi auditor, dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Ketepatan waktu penyampaian laporan audit tidak akan berarti apabila laporan yang disajikan ternyata dimanipulasi dan tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Menurut saya, perusahaan harus membangun budaya organisasi yang sehat, memperkuat sistem pengendalian internal, dan menjaga integritas seluruh pihak yang terlibat dalam proses audit agar laporan keuangan dapat dipercaya oleh investor dan masyarakat.

Referensi:

Othman, R., Ameer, R., & Laswad, F. (2020). *Uncovering Toshiba's Fraudulent Financial Statements: An Audit Perspective*. *Journal of Forensic and Investigative Accounting*.

## **KASUS WIRECARD AG (JERMAN)**

---

---

Kasus Wirecard AG merupakan salah satu skandal akuntansi terbesar di Eropa yang melibatkan manipulasi laporan keuangan dan kegagalan pengawasan audit. Wirecard adalah perusahaan teknologi finansial asal Jerman yang bergerak di bidang pembayaran digital dan pernah dianggap sebagai salah satu perusahaan paling sukses di Eropa. Namun, pada tahun 2020 terungkap bahwa perusahaan memiliki dana fiktif sebesar miliaran euro yang sebenarnya tidak pernah ada. Skandal ini menyebabkan kebangkrutan perusahaan dan mengguncang pasar keuangan internasional. Menurut saya, kasus Wirecard menunjukkan bahwa perusahaan modern dengan teknologi canggih sekalipun tetap memiliki risiko besar terhadap manipulasi laporan keuangan apabila sistem pengawasan tidak berjalan efektif.

Manipulasi dalam kasus Wirecard dilakukan dengan cara mencatat pendapatan dan saldo kas yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Perusahaan mengklaim memiliki dana miliaran euro di rekening bank tertentu, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan ternyata dana tersebut tidak dapat dibuktikan keberadaannya. Menurut saya, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya proses verifikasi yang ketat dalam audit laporan keuangan. Auditor tidak boleh hanya menerima informasi dari manajemen perusahaan tanpa melakukan pemeriksaan langsung terhadap bukti yang ada.

Peran komite audit dalam kasus Wirecard juga menjadi perhatian besar. Komite audit seharusnya bertugas mengawasi proses pelaporan keuangan dan memastikan bahwa perusahaan menerapkan prinsip transparansi serta tata kelola yang baik. Namun, dalam kasus ini, komite audit dianggap gagal mendeteksi berbagai kejanggalan dalam laporan keuangan perusahaan. Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa komite audit harus memiliki kompetensi tinggi serta independensi yang kuat agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan objektif.

Selain komite audit, auditor eksternal juga mendapat kritik keras dalam kasus Wirecard. Auditor dianggap gagal mendeteksi manipulasi keuangan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Menurut saya, kasus ini membuktikan bahwa reputasi auditor atau KAP besar tidak selalu menjamin kualitas audit yang baik apabila auditor kurang teliti atau terlalu percaya pada informasi dari manajemen perusahaan. Auditor eksternal harus memiliki skeptisisme profesional dan melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap seluruh transaksi penting perusahaan.

Peran auditor internal dalam kasus Wirecard juga dinilai belum efektif. Auditor internal seharusnya dapat membantu perusahaan mendeteksi risiko dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal sejak dini. Akan tetapi, lemahnya pengawasan internal membuat manipulasi laporan keuangan terus berlangsung tanpa terungkap. Menurut saya, auditor internal harus memiliki akses informasi yang luas dan kebebasan untuk melaporkan berbagai temuan audit tanpa tekanan dari manajemen perusahaan.

Kasus Wirecard memberikan dampak besar terhadap dunia bisnis dan industri keuangan digital di Eropa. Banyak investor mengalami kerugian besar akibat jatuhnya harga saham Wirecard setelah skandal terungkap. Selain itu, kasus ini juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan teknologi finansial dan lembaga pengawas keuangan di Jerman. Menurut saya, kepercayaan publik merupakan faktor utama dalam industri keuangan sehingga perusahaan harus menjaga transparansi dan integritas laporan keuangannya.

Sebagai respons terhadap kasus Wirecard, pemerintah Jerman dan regulator keuangan melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan perusahaan publik dan profesi audit. Berbagai aturan baru mulai diterapkan untuk meningkatkan kualitas audit dan memperkuat pengawasan terhadap perusahaan teknologi finansial. Menurut saya, langkah tersebut penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan dan meningkatkan perlindungan terhadap investor.

Secara keseluruhan, saya menilai bahwa kasus Wirecard memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya transparansi, kualitas audit, dan efektivitas pengendalian internal dalam perusahaan publik. Ketepatan waktu pelaporan audit

harus disertai dengan kualitas laporan yang akurat dan dapat dipercaya. Menurut saya, perusahaan perlu memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan independensi auditor, serta membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas agar kepercayaan investor dan masyarakat dapat terjaga dengan baik.

**Referensi:**

Financial Times. (2020). *Wirecard Accounting Scandal*.